



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2027



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan pendanaan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renja PD disusun berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2027.

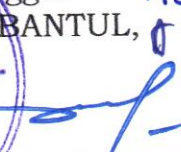
Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**
KABUPATEN BANTUL

BAB I

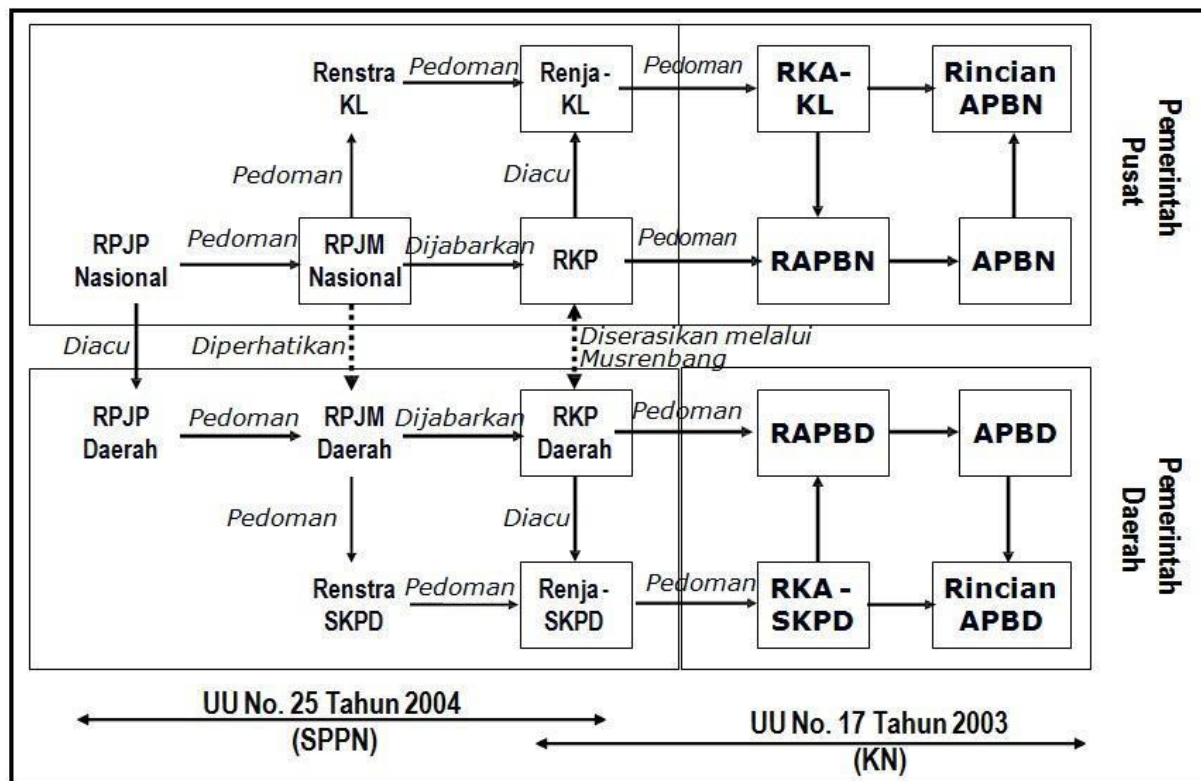
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

- Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
 - i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIM EWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	90	97.77	88	97	110.227	97	107.78
4.01.04	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	100	100	100	100	100	100	100.00
4.01.04. 5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se- DIY	3	3	3	3	100	3	100.00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	85.5	85.09	85.5	81.75	95.61	81.75	95.61
5.02.01. 2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100.00	100	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.02.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	6	100.00	6	100.00
5.02.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	10	10	100.00	10	100.00
5.02.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	100	100	100	100.00	100	100.00
5.02.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143	143	143	143	100.00	143	100.00
5.02.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	34	34	34	34	100.00	34	100.00
5.02.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	100	100	100.00	100	100.00
5.02.01. 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9	9	10	10	100.00	10	111.11

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.02.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	98.70	100	100	100.00	100	100.00
5.02.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	12	1	1	100.00	13	54.17
5.02.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58	58	37	37	100.00	37	63.79
5.02.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	15	14	14	100.00	14	87.50
5.02.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	8	5	5	100.00	13	86.67
5.02.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3	4	1	1	100.00	3	100.00
5.02.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	700	1354	95	95	100.00	700	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		dan Konsultasi SKPD							
5.02.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15	8	7	7	100.00	15	100.00
5.02.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	2	1	1	100.00	1	100.00
5.02.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100.00	100	100.00
5.02.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	72	51	5	5	100.00	56	77.78
5.02.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56	195	-	-	-	195	348.21
5.02.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100	100	100	100	100.00	100	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Pemerintahan Daerah							
5.02.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42	38	42	42	100.00	42	100.00
5.02.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100.00	100	100.00
5.02.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79	79	81	81	100.00	81	102.53
5.02.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	141	264	124	124	100.00	124	87.94

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	100	100	100	100	100.00	100	100.00
		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	91	90	90	90.14	100.16	90.14	99.05
		Penyampaian raperda pertanggungjawab an APBD tepat waktu	100	100	100	100	100.00	100	100.00
5.02.02. 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah	60	60	60	52	86.67	52	86.67
5.02.02. 2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	1	1	1	100.00	1	100.00
5.02.02. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	1	1	1	100.00	1	100.00
5.02.02. 2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	396	396	396	396	100.00	396	100.00
5.02.02. 2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	2	2	2	2	100.00	2	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	tentang Penjabaran APBD							
5.02.02. 2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	2	2	100.00	2	100.00
5.02.02. 2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	1	1	1	100.00	1	100.00
5.02.02. 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15	80	15	81	540.00	81	540.00
5.02.02. 2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64	64	64	64	100.00	64	100.00
5.02.02. 2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	452	452	452	452	100.00	452	100.00
5.02.02. 2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan	88	88	88	88	100.00	88	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
5.02.02. 2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14	14	14	14	100.00	14	100.00
5.02.02. 2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42	42	42	42	100.00	42	100.00
5.02.02. 2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	1	1	1	1	100.00	1	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan							
5.02.02. 2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	438	578	140	140	100.00	140	31.96
5.02.02. 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	9	0	9	5.7	63.33	5.7	63.33
5.02.02. 2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649	649	707	707	100.00	707	108.94
5.02.02. 2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	2	2	2	2	100.00	2	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Pendapatan-LO, dan Beban							
5.02.02. 2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.02. 2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100.00	2	100.00
5.02.02. 2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	1	1	1	100.00	1	100.00
5.02.02. 2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi	1	1	1	1	100.00	1	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah							
5.02.02. 2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	52	52	52	52	100.00	52	100.00
5.02.02. 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	15	80	15	81	540.00	81	540.00
5.02.02. 2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	87	87	78	78	100.00	78	89.66
5.02.02. 2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	1	1	100.00	1	100.00
5.02.02. 2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75	75	75	75	100.00	75	100.00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100	100	100	100	100.00	100	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.02.03. 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	100	98	98	98	100.00	98	98.00
5.02.03. 2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1	1	1	100.00	1	100.00
5.02.03. 2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	120	240	120	120	100.00	120	100.00
5.02.03. 2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	0	1	1	100.00	1	100.00
5.02.03. 2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52	52	52	52	100.00	52	100.00
5.02.03. 2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4	4	4	4	100.00	4	100.00
5.02.03. 2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1622	1622	1622	1622	100.00	1622	100.00
5.02.03. 2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	1	1	1	100.00	1	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.02.03. 2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11	11	11	11	100.00	11	100.00
5.02.03. 2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16	16	16	16	100.00	16	100.00
5.02.03. 2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	221	221	221	221	100.00	221	100.00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	23.69	24.15	23.69	31.32	132.21	31.32	132.21
		Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100	100	100	96	96.00	96	96.00
5.02.04. 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	46	43,2	46	55.9	121.52	55.9	121.52
5.02.04. 2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	12	12	12	12	100.00	12	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Kebijakan Pajak Daerah							
5.02.04. 2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6	8	4	4	100.00	4	66.67
5.02.04. 2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	28	23	27	27	100.00	27	96.43
5.02.04. 2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.04. 2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	5	7	7	100.00	7	58.33
5.02.04. 2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	12	12	12	12	100.00	12	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5.02.04. 2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.04. 2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	12	7	7	100.00	12	100.00
5.02.04. 2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.04. 2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.04. 2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.04. 2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	12	12	12	100.00	12	100.00
5.02.04. 2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	15	15	15	15	100.00	15	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 01	SEKRETARIAT DAERAH								
4 02 04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	98	97	97.2	97.2	100	97.2	99.18
4 03 05 5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se- DIY	15	3	3	3	100	3	20
4 04 06 5.06 0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se- DIY	15	3	3	3	100	3	20

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5 02	KEUANGAN								
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	86.77	81.75	82.73	82.73	100	82.73	95.34
		Indekss Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	84.2	83.3	83.4	83.4	100	83.4	99.05
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	6	6	6	100	6	25
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	10	12	12	100	12	14.29
5 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	6	6	6	100	6	25
5 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	10	12	12	100	12	14.29

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	715	143	143	143	100	143	20
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	170	34	34	34	100	34	20
5 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	715	143	143	143	100	143	20
5 02 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	170	34	34	34	100	34	20
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35	10	10	10	100	10	28.57
5 02 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35	10	10	10	100	10	28.571
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34	1	5	5	100	6	17.647
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200	37	30	30	100	67	33.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80	14	17	17	100	31	38.75
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	75	5	5	5	100	10	13.33
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	1	1	1	100	2	13.33
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	864	95	160	160	100	255	29.51
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30	7	7	7	100	14	46.67
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	1	1	1	100	2	40
5 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34	1	5	5	100	6	17.65
5 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200	37	30	30	100	67	33.50
5 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80	14	17	17	100	31	38.75

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	75	5	5	5	100	10	13.33
5 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	1	1	1	100	2	13.33
5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	864	95	160	160	100	255	29.51
5 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30	7	7	7	100	14	46.67
5 02 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	1	1	1	100	2	40
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	25	5	6	6	100	11	44
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77	1	2	2	100	3	3.90
5 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	25	5	6	6	100	11	44

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77	1	2	2	100	3	3.896.103.896
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	42	12	12	100	24	40
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	24	40
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	24	40
5 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	42	12	12	100	24	40
5 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	24	40
5 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	24	40
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	395	81	104	104	100	185	46.84

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	615	124	120	120	100	244	39.67
5 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	395	81	104	104	100	185	46.84
5 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	615	124	120	120	100	244	39.67
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	32	33.09	30	30	100	30	93.75
		Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	29	29.63	35	35	100	35	120.69
		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	6.32	7.11	7	7	100	7	110.76
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5	1	1	1	100	2	40
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5	1	1	1	100	2	40
		Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	1996	396	396	396	100	792	39.68
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	2	2	2	100	4	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10	2	2	2	100	4	40
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	1	1	1	100	2	40
5 02 02 2.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5	1	1	1	100	2	40
5 02 02 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5	1	1	1	100	2	40
5 02 02 2.01 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	1996	396	396	396	100	792	39.68
5 02 02 2.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	2	2	2	100	4	40
5 02 02 2.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10	2	2	2	100	4	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5 02 02 2.01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	1	1	1	100	2	40
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	320	64	198	198	100	262	81.9
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1492	452	452	452	100	904	60.6
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	440	88	88	88	100	176	40
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	70	14	42	42	100	56	80
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	210	42	7	7	100	49	23.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5	1	1	1	100	2	40
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2190	140	140	140	100	280	12.79
5 02 02 2.02 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	320	64	198	198	100	262	81.88
5 02 02 2.02 0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1492	452	452	452	100	904	60.59
5 02 02 2.02 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	440	88	88	88	100	176	40
5 02 02 2.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	70	14	42	42	100	56	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas							
5 02 02 2.02 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	210	42	7	7	100	49	23.33
5 02 02 2.02 0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5	1	1	1	100	2	40
5 02 02 2.02 0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2190	140	140	140	100	280	12.79
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	3245	707	648	648	100	1355	41.76

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	10	2	2	2	100	4	40.00
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	60	12	31	31	100	43	71.67
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	2	2	2	100	4	40.00
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5	1	1	1	100	2	40.00
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	1	1	1	100	2	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	260	52	70	70	100	122	46.92
5 02 02 2.03 0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	3245	707	648	648	100	1355	41.76
5 02 02 2.03 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	10	2	2	2	100	4	40.00
5 02 02 2.03 0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	60	12	31	31	100	43	71.67
5 02 02 2.03 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	10	2	2	2	100	4	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
5 02 02 2.03 0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5	1	1	1	100	2	40.00
5 02 02 2.03 0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	1	1	1	100	2	40.00
5 02 02 2.03 0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	260	52	70	70	100	122	46.92
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	390	78	90	90	100	168	43.08
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5	1	1	1	100	2	40.00
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	375	75	75	75	100	150	40.00
5 02 02 2.04 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	390	78	90	90	100	168	43.08

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5 02 02 2.04 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5	1	1	1	100	2	40.00
5 02 02 2.04 0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	375	75	75	75	100	150	40.00
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka assets management	79	65.5	66	66	100	66	83.54
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	10	1	1	1	100	2	20.00
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	600	120	120	120	100	240	40.00
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	1	1	1	100	2	40.00
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	276	52	52	52	100	104	37.68
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	20	4	4	4	100	8	40.00
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1626	1622	1622	1622	100	1622	99.75
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	5	1	1	1	100	2	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah							
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	55	11	11	11	100	22	40.00
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	80	16	16	16	100	32	40.00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	918	221	240	240	100	461	50.22
5 02 03 2.01 0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	10	1	1	1	100	2	20.00
5 02 03 2.01 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	600	120	120	120	100	240	40.00
5 02 03 2.01 0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	1	1	1	100	2	40.00
5 02 03 2.01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	276	52	52	52	100	104	37.68

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5 02 03 2.01 0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	20	4	4	4	100	8	40.00
5 02 03 2.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1626	1622	1622	1622	100	1622	99.75
5 02 03 2.01 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	1	1	1	100	1	20.00
5 02 03 2.01 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	55	11	11	11	100	22	40.00
5 02 03 2.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	80	16	16	16	100	32	40.00
5 02 03 2.01 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	918	221	240	240	100	461	50.22
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih	80	78.25	78.5	78.5	100	78.5	98.13

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	10.96	10.76	10.79	10.79	100	10.79	98.45
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	15	12	12	12	100	12	80.00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20	4	4	4	100	8	40.00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	55	27	10	10	100	37	67.27
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	60	12	12	12	100	24	40.00
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	15	7	3	3	100	10	66.67
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	169	12	30	30	100	42	24.85
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	60	12	12	12	100	24	40.00
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35	7	7	7	100	14	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	60	12	12	12	100	24	40.00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3176500	12	12	12	100	24	0.00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3175	12	12	12	100	24	0.76
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	17	12	12	12	100	12	70.59
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	60	15	12	12	100	27	45.00
5 02 04 2.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	15	12	12	12	100	12	80.00
5 02 04 2.01 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20	4	4	4	100	8	40.00
5 02 04 2.01 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	55	27	10	10	100	37	67.27
5 02 04 2.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	60	12	12	12	100	24	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
5 02 04 2.01 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	15	7	3	3	100	10	66.67
5 02 04 2.01 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	169	12	30	30	100	42	24.85
5 02 04 2.01 0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	60	12	12	12	100	24	40.00
5 02 04 2.01 0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35	7	7	7	100	14	40.00
5 02 04 2.01 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	60	12	12	12	100	24	40.00
5 02 04 2.01 0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3176500	12	12	12	100	24	0.00
5 02 04 2.01 0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3175	12	12	12	100	24	0.76
5 02 04 2.01 0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	17	12	12	12	100	12	70.59
5 02 04 2.01 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	60	15	12	12	100	27	45.00

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
 - a. Surat tagihan pajak daerah tidak tersampaikan ke wajib pajak, dikarenakan alamat wajib pajak terbaru tidak ditemukan, ataupun data subyek pajak sudah berubah tetapi tidak dilakukan pemutakhiran data
 - b. Masyarakat perdesaan masih belum familiar dengan digitalisasi Pajak Daerah, sehingga perlu peningkatan sosialisasi dan pemberian panduan penggunaan digitalisasi Pajak Daerah
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
 - a. Adanya pembaharuan pada Aplikasi SmartGov dan CitiGov, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pelayanan secara online, cetak Salinan SPPT PBB P2 secara online, penambahan *Virtual Account* pada pembayaran Pajak Daerah serta penggunaan QRIS pada pembayaran PBB P2; dan
 - b. Adanya peran aktif dari pemerintah kapanewon sampai dengan padukuhan di Kabupaten Bantul dalam melakukan monitoring atas pembayaran Pajak Daerah diwilayahnya.
 - c. Terdapat koordinasi rutin atas penganggaran, penatausahaan, pelaporan realisasi, serta penggunaan barang milik daerah.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Membangun keterbukaan dengan publik sehingga masyarakat dapat mengetahui secara *real time* atas pengelolaan Pajak Daerah, hal ini dilakukan dengan memberikan informasi secara berkelanjutan baik melalui media informasi, media social, maupun kegiatan sosialisasi;
2. Melakukan pendataan atas wajib pajak baru;

3. Melakukan pemutakhiran basis data PBB P2 secara bertahap dengan menempatkan personal pendataan khusus dimasing masing Kapanewon;
4. Melakukan upaya penagihan atas piutang Pajak Daerah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul; dan
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah dengan aplikasi e-Retribusi.
6. Membangun *dashboard* Pendapatan Asli Daerah, sehingga bisa memberikan Gambaran secara *real-time* atas Pendapatan Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	jumlah	3	7	4	2	4	-	-
	b. Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah	Persen	23,91	24,31	24,47	30,5	24,27	-	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	Indeks	66,632	72,193	75,139	73,096	75,214	75,364	75,515
	b. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,81	0,79	0,81	1,06	0,90-0,96	0,91-0,97	0,92-0,98
	c. Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Persen	N/A	N/A	95,208	94,85	95,27	95,32	95,38
	d. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	N/A	N/A	24,47	30,5	24,54	25,11	25,69
	e. Persentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	N/A	N/A	81,5	82	82	83	84,66
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	4.a.1 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	12	19,753	24,121	40,02	36,42	36,64	36,86
	4.a.2 Rasio PAD	Persen	23,91	24,31	24,47	30,49	24,47	24,59	24,72

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	4.a.5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	71,369	71,305	70,254	74,26	70,29	70,08	69,87
	4.a.6 Opini Laporan Keuangan	Predikat	10	10	10	10	10	10	10
	4.d.1 Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	0,041	0,209	0,165	6,38	0,115	0,113	0,11
	4.d.2 Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	6,244	6,409	10,748	0,49	10,37	10	10,25
	4.d.3 Manajemen Aset	Kategori	4	4	4	4	4	4	4
	4.d.4 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	9,68	8,73	7,18	6,16	7,11	7	7
IV	IKK Perubahan 2025								
	4.b.1. Persentase belanja pegawai daerah	Persen				32,34			
	4.b.2. Persentase PAD thd pendapatan daerah	Persen				30,5			
	4.b.3. Persentase realisasi belanja ur. wajib pelayann dasar	Persen				60,32			
	4.b.4. Persentase alokasi blj infrastruktr pelayann publik	Persen				30,65			
	4.b.1. Persentase belanja pegawai daerah	Persen				32,34			

Sumber : LRA audited 2026Kabupaten Bantul

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
 - a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
 - b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator (IKU dan IKK) yang tidak dapat memenuhi target adalah:
 - a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1
IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Nilai pada Dimensi 1 dengan target 15 poin hanya terpenihi dengan nilai 11,52, yaitu pada kesesuaian Program RPJMD dengan RKPD, kesesuaian pagu RKPD dengan KUAPPAS, dan kesesuaian pagu KUAPPAS dengan APBD
 - 2) Nilai pada Dimensi 2 dengan target 20 poin hanya terpenihi dengan nilai 8,9097, yaitu adanya alokasi dana yang belum sesuai atas alokasi dana pendidikan, alokasi dana pegawai, alokasi belanja infrastruktur, dan alokasi belanja untuk memenuhi SPM
 - 3) Nilai pada Dimensi 5 tentang kondisi keuangan daerah dengan target 20 poin hanya terpenihi dengan nilai 8,0000, yaitu belum ada kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas oprasional.
 - b. Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku. KU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Terdapat beberapa serapan belanja di beberapa Perangkat daerah tidak maksimal

3. Indikator (IKU dan IKK) yang dapat memenuhi target adalah:
- a. Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1
 - b. Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah
 - c. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
 - d. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah
 - e. Persentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah
 - f. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan
 - g. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)
 - h. Opini Laporan Keuangan
 - i. Manajemen Aset
 - j. Persentase belanja pegawai daerah
 - k. Persentase PAD thd pendapatan daerah
 - l. Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayann dasar
 - m. Persentase alokasi belanja infrastrktr pelayann publik
 - n. Persentase belanja pegawai daerah

IKU dan IKK tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melakukan intensifikasi atas penagihan dan pembayaran piutang pajak daerah
- b. Sosialisasi atau informasi publik kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bantul atas Pengelolaan pajak daerah
- c. Pengembangan aplikasi pelayanan Pajak Daerah secara online dan sistem pembayaran menggunakan virtual account
- d. Dalam pengelolaan keuangan terdapat aplikasi SIPD yang menunjang akuntabilitas laporan, adapun beberapa tetap menggunakan olah data

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya

seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rekonsiliasi secara periodik oleh bidang Akuntansi dan bidang Aset.
2. Melakukan pencatatan untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan Koreksi Ekuitas lainnya.
3. Membangun keterbukaan dengan publik tentang pengelolaan Pajak Daerah melalui media informasi, media social, dan kegiatan sosialisasi;
4. Melakukan pendataan atas wajib pajak baru;
5. Melakukan pemutakhiran basis data PBB P2 secara bertahap dengan menempatkan personal pendataan khusus dimasing masing Kapanewon;
6. Melakukan upaya penagihan atas piutang Pajak Daerah dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul; dan
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah dengan aplikasi e-Retribusi.
8. Membangun dashboard Pendapatan Asli Daerah, sehingga bisa memberikan Gambaran secara real-time atas Pendapatan Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Keuangan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen dan kemampuan SDM yang baik dalam pengelolaan dan pelaporan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Tuntutan penyesuaian penggunaan aplikasi SIPD yang terus mengalami pengembangan
Adanya dukungan sistem Pajak Daerah Online sehingga dapat memudahkan dalam pemberian pelayanan serta percepatan pendapatan pajak daerah	

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mempertahankan opini WTP atas LKPD melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis <i>akrual</i>	Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD yang masih terdapat catatan yang berulang
Adanya potensi objek pajak daerah baru	Minimnya literasi digital dalam pembayaran pajak daerah

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan opini WTP terkait pelaporan keuangan dengan tanpa catatan berulang serta memaksimalkan tanpa adanya catatan;
2. Meningkatkan pelayanan serta kemudahan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;
3. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang terintegrasi; dan
4. Peningkatan pengendalian atas penatausahaan aset dan persediaan;
5. Sosialisasi Pajak Daerah ketingkat Padukuhan tentang pengelolaan Pajak Daerah beserta kemudahan digitalisasi pelayanan yang diberikan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kab. Bantul	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	97.4	70.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kab. Bantul	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	97.4	80.824.900	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul			70.000.000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul			80.824.900	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se- DIY	3	70.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se- DIY	3	80.824.900	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*)	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83.72	77.786.778.368	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*)	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83.72	93.193.079.346	
		Kab. Bantul	Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.60			Kab. Bantul	Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.60		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul			36.779.266	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul			14.637.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	11.316.697,34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	6.350.000	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	12	14.853.165,26	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	12	1.912.500	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	10.609.403,76	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	6.375.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			30.317.599.575	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul			38.603.190.292	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143	29.886.440.387,25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143	38.192.250.292	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34	431.159.187,66	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34	410.940.000	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul			207.838.220	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul			207.775.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7	9.654.557,42	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7	7.125.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	148.531.652,59	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98	49.652.009,58	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98	200.650.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul			1.577.668.203	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul			1.618.324.930	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	6.683.924,37	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	5.755.200	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38	496.520.095,78	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38	352.258.110	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	40.846.204,46	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	22.114.120	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	427.912.618,16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	71.264.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	10.927.685,87	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	9.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	168	500.410.210,49	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	168	1.079.115.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	19.804.220,35	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	11.468.000	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	74.563.243,24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	67.350.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			1.485.316.526	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul			2.216.449.600	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	4	1.131.669.733,98	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	4	1.789.513.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	20	353.646.791,87	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	20	426.936.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			43.486.818.499	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			49.541.279.524	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	13.113.223,04	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12.840.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	43.286.367.324,64	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	48.152.699.994	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	187.337.951,62	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.375.739.530	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			674.758.079	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul			991.422.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79	599.784.959,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79	896.772.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123	74.973.120,26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123	94.650.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Bantul	Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja	33.50	361.648.134.209	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Bantul	Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja	33.50	383.142.183.161	
		Kab. Bantul	Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	30.5			Kab. Bantul	Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	30.5		
		Kab. Bantul	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja	7.00			Kab. Bantul	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja	7.00		

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dalam APBD Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran n-1					dalam APBD Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran n-1			
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bantul			764.366.043	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Bantul			544.662.100	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	84.976.769,63	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	59.400.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	84.976.769,63	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	59.700.100	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Bantul	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	400	38.239.546,33	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Bantul	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	400	31.354.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	314.414.047,63	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	221.550.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	237.934.954,96	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	171.262.000	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	3.823.954,63	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	1.395.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Bantul			2.155.547.846	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Bantul			477.572.003	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64	299.118.229,10	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64	140.687.000	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	260	28.042.333,98	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	260	5.880.103	
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	88	29.911.822,91	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	88	3.750.000	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	3	373.897.786,37	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	-	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	168.254.003,87	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14	266.896.652,61	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14	3.985.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42	444.003.621,31	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42	170.225.000	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	221.534.438,42	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	1	5.175.000	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	438	323.888.957,44	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	438	147.869.900	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Bantul			741.571.024	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Bantul			801.412.800	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	649	112.169.335,91	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	649	28.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	22.433.867,18	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	24.485.000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	36.034.399,16	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	48.850.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	373.897.786,37	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	516.381.800	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	12.729.520,09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	4.335.000	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	24.549.788,75	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	4.250.000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	52	136.387.715,26	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	52	7.225.000	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	31	23.368.611,65	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	31	166.986.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Bantul			357.986.649.296	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Bantul			381.318.536.258	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	78	281.332.912.926,56	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	78	314.150.934.030	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	41.593.925.880,82	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	11.332.071.799	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	75	35.059.810.488,43	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	75	55.835.530.429	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Bantul	Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka asset management	69.00	1.391.795.355	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Bantul	Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka asset management	69.00	2.029.649.100	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul			1.391.795.355	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul			2.029.649.100	
	Penyusunan Standar Harga	Kab. Bantul	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	221.227.158	Penyusunan Standar Harga	Kab. Bantul	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	305.300.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	120	4.570.943	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	120	7.535.000	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	32.533.406	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	97.611.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	56	260.267.244	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	56	337.550.000	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4	221.227.158	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4	10.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	7.808.017	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	636.806.700	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	48.800.108	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	4.550.500	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11	211.467.136	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11	160.919.000	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	16	253.760.563	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	16	396.541.700	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	215	130.133.622	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	215	72.585.200	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Bantul	Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih	78.75	10.579.543.607	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Bantul	Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih	78.75	12.163.426.200	
		Kab. Bantul	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10.84			Kab. Bantul	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10.84		
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kab. Bantul			10.579.543.607	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kab. Bantul			12.163.426.200	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3	1.880.982.809,16	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3	2.311.300.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	834.787.759,69	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	594.035.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11	2.117.222.763,97	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11	1.208.535.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	745.562.802,52	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	1.820.622.800	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	372.289.199,47	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	817.066.500	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Bantul	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	30	45.772.371,69	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Bantul	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	30	246.806.500	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	1.768.597.715,85	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	1.552.618.900	

[illegible]

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

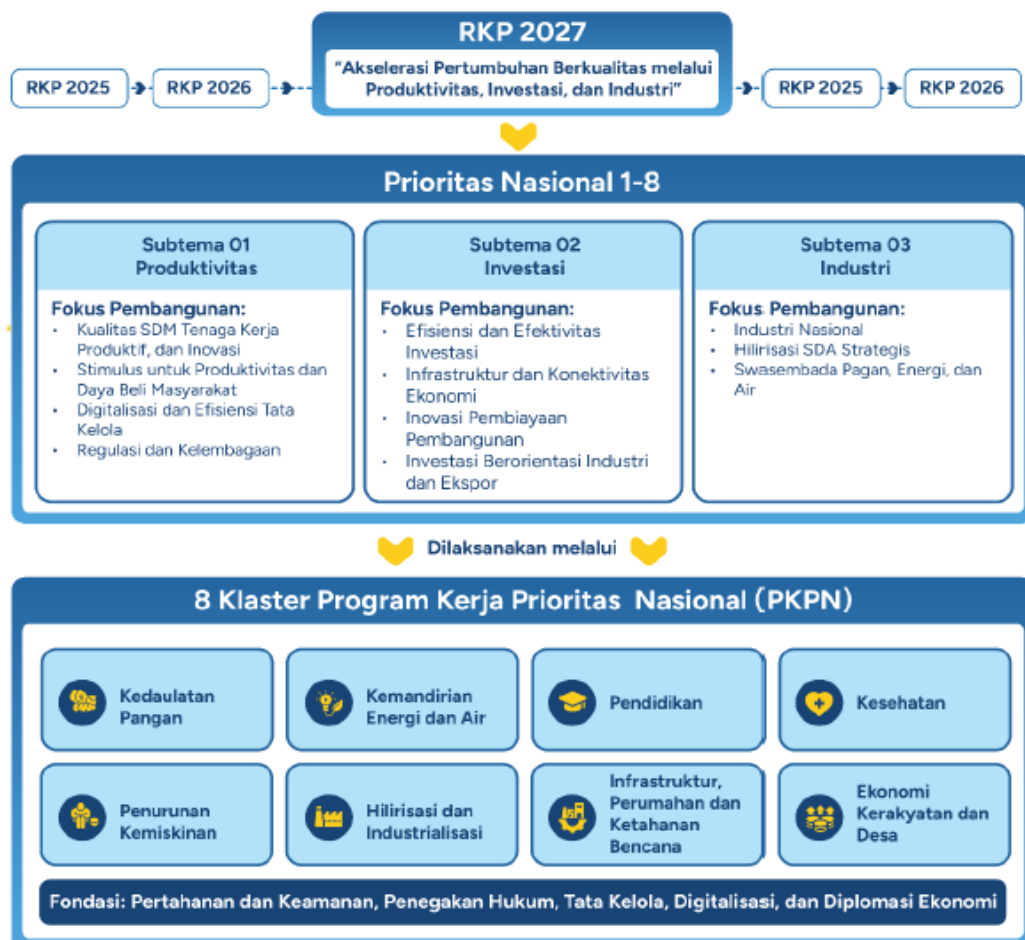
Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”** yang dilaksanakan melalui 8 kluster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

4. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong potensi daerah dalam menunjang berbagai macam program unggulan.
5. Melakukan program pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai bentuk insentif fiskal guna melindungi lahan pertanian produktif.
6. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan meningkatkan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
7. Melakukan akselerasi transformasi digital pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

- PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
- PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
- PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
- PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
- PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah serta

tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	Indeks	73,096	75,364	75,515
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	1,06	0,91-0,97	0,92-0,98
		Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Persen	94,85	95,32	95,38
			Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	24,54	25,11	25,69
			Persentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	82	83	84,66

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	6.350.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Dokumen	11.457.632,41	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.912.500,00							14.827.524,29	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.912.500,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	14.827.524,29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						39.480.973.593,00					Perangkat Daerah BPKPAD		30.350.481.113,02	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						39.480.973.593,00					Perangkat Daerah BPKPAD		30.350.481.113,02	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34 Laporan		34 Laporan	34 Laporan	410.940.000,00						34 Laporan	447.827.117,27	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/bulan		143 Orang/bulan	143 Orang/bulan	39.070.033.593,00						143 Orang/bulan	29.902.653.995,75	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						39.070.033.593,00							29.902.653.995,75	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/bulan		143 Orang/bulan	143 Orang/bulan	#####	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		143 Orang/bulan	#####	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						410.940.000,00							447.827.117,27	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34 Laporan		34 Laporan	34 Laporan	410.940.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		34 Laporan	447.827.117,27	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						39.850.000,00					Perangkat Daerah BPKPAD		60.758.139,70	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						39.850.000,00					Perangkat Daerah BPKPAD		60.758.139,70	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	5.250.000,00						7 Dokumen	9.659.795,09	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98 Orang		98 Orang	98 Orang	34.600.000,00						98 Orang	51.098.344,61	
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.250.000,00							9.659.795,09	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen		7 Dokumen	4 Dokumen	5.250.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Dokumen	9.659.795,09	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						34.600.000,00							51.098.344,61	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98 Orang		98 Orang	175 Orang	34.600.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		98 Orang	51.098.344,61	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.577.610.820,00					Perangkat Daerah BPKPAD		1.591.408.941,33	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.577.610.820,00					Perangkat Daerah BPKPAD		1.591.408.941,33	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	9.000.000,00						3 Dokumen	10.725.354,90	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	66.950.000,00						1 Dokumen	73.182.671,59	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	11.468.000,00						6 Dokumen	23.589.243,19	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168 Laporan		168 Laporan	168 Laporan	1.051.045.000,00						168 Laporan	476.839.701,55	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	71.265.100,00						15 Paket	448.532.609,73	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		6 Paket	7 Paket	5.755.200,00						7 Paket	6.687.550,44	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket		36 Paket	38 Paket	340.013.400,00						40 Paket	510.983.446,11	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	22.114.120,00						16 Paket	40.868.363,82	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	7 Dokumen	11.468.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		6 Dokumen	23.589.243,19	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						66.950.000,00							73.182.671,59	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	66.950.000,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	73.182.671,59	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.219.749.600,00					Perangkat Daerah BPKPAD		1.415.354.591,16	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.219.749.600,00					Perangkat Daerah BPKPAD		1.415.354.591,16	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		6 Unit	4 Unit	795.363.000,00						4 Unit	1.078.365.402,79	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		14 Unit	20 Unit	424.386.600,00						20 Unit	336.989.188,37	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						795.363.000,00							1.078.365.402,79	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		6 Unit	1 Unit	795.363.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Unit	1.078.365.402,79	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						424.386.600,00							336.989.188,37	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		14 Unit	73 Unit	424.386.600,00	Kab. Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Unit	336.989.188,37	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49.536.877.024,00					Perangkat Daerah BPKPAD		43.924.420.404,87	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49.536.877.024,00					Perangkat Daerah BPKPAD		43.924.420.404,87	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.152.699.994,00						12 Laporan	43.722.325.256,29	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit		79 Unit	79 Unit	856.782.900,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		79 Unit	605.825.683,29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						94.650.000,00							75.728.210,21	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123 Unit		123 Unit	122 Unit	94.650.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		123 Unit	75.728.210,21	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
3.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						334.342.465.962,00							363.027.847.141,65	
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah						334.342.465.962,00							362.940.589.090,64	
			999.Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	6.32 %		7.00 %	7.00 %	334.342.465.962,00						6.65 %	362.940.589.090,64	
			999.Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	32%		30%	30.5 %	334.342.465.962,00						31%	362.940.589.090,64	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	400 Dokumen		396 Dokumen	400 Dokumen	31.354.900,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		400 Dokumen	39.058.365,69	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						217.850.000,00							324.101.332,31	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	217.850.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	324.101.332,31	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						167.562.000,00							240.998.426,59	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	167.562.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	240.998.426,59	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						1.395.000,00							4.155.145,29	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.395.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	4.155.145,29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						401.251.603,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		1.734.519.767,86	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						401.251.603,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		1.734.519.767,86	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64 Dokumen		64 Dokumen	64 Dokumen	99.814.500,00						64 Dokumen	321.774.450,95	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	88 Dokumen		88 Dokumen	88 Dokumen	3.750.000,00						88 Dokumen	32.177.445,10	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	3.985.000,00						14 Dokumen	287.112.303,77	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	260 Dokumen		452 Dokumen	260 Dokumen	5.880.103,00						260 Dokumen	29.086.017,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42 Dokumen		42 Dokumen	42 Dokumen	170.225.000,00						42 Dokumen	477.633.950,63	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.175.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	238.314.202,74	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						112.422.000,00							348.421.397,67	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	438 Orang		438 Orang	438 Orang	112.422.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		438 Orang	348.421.397,67	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						591.462.800,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		792.644.988,51	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						591.462.800,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		792.644.988,51	
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	31 Lembaga		31 Lembaga	31 Lembaga	91.611.000,00						31 Lembaga	25.138.628,98	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	24.485.000,00						2 Dokumen	24.133.083,82	
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.320.000,00						1 Dokumen	13.320.232,35	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649 Laporan		649 Laporan	649 Laporan	27.675.000,00						649 Laporan	120.665.419,11	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.350.000,00						12 Laporan	38.763.765,89	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang		52 Orang	52 Orang	6.100.000,00						52 Orang	142.716.775,14	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	31 Lembaga		31 Lembaga	31 Lembaga	91.611.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		31 Lembaga	25.138.628,98	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						332.816.189.459,00					Masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul		359.717.853.013,38	
		Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						332.816.189.459,00					Masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul		359.717.853.013,38	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	78 Laporan		78 Laporan	78 Laporan	271.980.659.030,00						78 Laporan	283.382.977.729,39	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75 Laporan		75 Laporan	75 Laporan	55.835.530.429,00						75 Laporan	35.658.157.210,02	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00						1 Laporan	40.676.718.073,97	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						271.980.659.030,00							283.382.977.729,39	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	78 Laporan		78 Laporan	78 Laporan	#####	Kab. Bantul	Dana Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Opsen PKB	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		78 Laporan	#####	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
											dan penyeludupan.					
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						5.000.000.000,00							40.676.718.073,97	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	40.676.718.073,97	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						55.835.530.429,00							35.658.157.210,02	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75 Laporan		75 Laporan	75 Laporan	55.835.530.429,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		75 Laporan	35.658.157.210,02	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						1.876.706.600,00							1.399.349.647,00	
		Meningkatnya kualitas tata kelola barang milik daerah						1.876.706.600,00							1.177.077.597,00	
			999.Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka assets management	79.00 %		66.00 %	69.00 %	1.876.706.600,00						72.60 %	1.177.077.597,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.876.706.600,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		1.399.349.647,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.876.706.600,00					Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		1.399.349.647,00	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.695.000,00						1 Dokumen	32.687.066,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	349.891.700,00						16 Laporan	254.959.116,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.250.000,00						4 Laporan	222.272.050,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1622 Laporan	1 Laporan	636.156.700,00						1 Laporan	8.825.508,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	155.606.500,00						11 Laporan	212.465.930,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.550.500,00						1 Laporan	49.030.599,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	56 Laporan		52 Laporan	56 Laporan	337.550.000,00						56 Laporan	261.496.529,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	215 Orang		58 Orang	215 Orang	55.021.200,00						215 Orang	130.748.265,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.695.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Dokumen	32.687.066,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						337.550.000,00							261.496.529,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	56 Laporan		52 Laporan	56 Laporan	337.550.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		56 Laporan	261.496.529,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						10.250.000,00							222.272.050,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	349.891.700,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		16 Laporan	254.959.116,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						55.021.200,00							130.748.265,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	215 Orang		58 Orang	200 Orang	55.021.200,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		215 Orang	130.748.265,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						11.379.201.200,00							10.636.966.534,00	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						11.379.201.200,00							10.636.966.534,00	
			999.Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih	80%		78.50 %	78.75 %	11.379.201.200,00						79%	10.636.966.534,00	
			999.Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10.96 %		10.79 %	10.84 %	11.379.201.200,00						10.89 %	10.636.966.534,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						11.379.201.200,00					Masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul		10.636.966.534,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						11.379.201.200,00					Masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul		10.636.966.534,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.150.000,00						12 Dokumen	278.387.203,03	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	2.301.700.000,00						3 Dokumen	1.860.785.238,07	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	635500 Dokumen		635100 Dokumen	635200 Dokumen	1.851.305.000,00						635300 Dokumen	792.417.111,08	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	123.300.000,00						3 Dokumen	277.472.804,60	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	625 Dokumen		645 Dokumen	640 Dokumen	12.000.000,00						635 Dokumen	83.698.377,99	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.521.221.400,00						12 Dokumen	1.815.629.812,94	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	81.375.000,00						12 Laporan	50.615.855,10	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	81.375.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	50.615.855,10	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						32.650.000,00							39.440.926,35	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	32.650.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		3 Laporan	39.440.926,35	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	JUMLAH							440.493.955.199,00							4,53184E+11	

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.



Kepala,

ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA.

NIP. 197503251996032003